

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ASEAN *POLITICAL – SECURITY COMMUNITY* DI KAWASAN ASIA TENGGARA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

Izdiharyah Akbar

1210112079

Dosen Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM

Sri Oktavia, SH., M.Sc., Phd.D

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ASEAN *POLITICAL-SECURITY COMMUNITY* DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Izdiharsyah Akbar¹, Firman Hasan¹, Sri Oktavia¹
Prodi Ilmu Hukum¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas¹
(E-mail : Harsyah_A@hotmail.com)

ABSTRAK

ASEAN *Political – Security Community* (APSC) adalah perjanjian negara - negara ASEAN untuk menjamin terpeliharanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara, terjalannya kerja sama di bidang yang berkaitan dengan politik. Perjanjian ini menimbulkan kerancuan pada regulasi dan pengimplementasiannya. Ini disebabkan karena negara anggota ASEAN mempunyai visi dan misi, serta aturan hukum yang berbeda dalam menangani isu – isu politik dan keamanan. Dari hal itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kerangka kerja, hambatan dan implementasi APSC di Indonesia dan bagaimana solusi terhadap hambaan yang ditemui dalam implementasi APSC di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data bertumpu pada data primer yaitu melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Sebagai data penujang digunakan data sekunder berupa perjanjian internasional dan instrument hukum lainnya. Lokasi penelitian adalah pada kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta dan Kantor Kementerian Luar Negeri. Diperoleh hasil bahwa kerangka kerja dari ASEAN *Security – Community* terbagi atas beberapa badan sektoral yang membawahi bidang tertentu melalui ASCO, AMM, SEANFWZ Commision, ADMM, ALAWMM, AMMTC, dan ARF. Tiap kesepakatan dari perundingan oleh badan – badan sektoral ini dijadikan sebagai dasar untuk tiap negara anggota ASEAN dalam merancang aturan hukum terkait dengan politik dan keamanan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melaksanakan perintah dari ASEAN *Political – Security Community* dan solusinya adalah anggota – anggota ASEAN harus lebih meningkatkan kerja sama di bidang politik dan keamanan.

Kata Kunci : Tinjauan, Kesepakatan, ASEAN *Political – Security Community*, Asia Tenggara

A YURIDICAL ANALYSIS ASEAN POLITICAL – SECURITY COMMUNITY AGREEMENT IN SOUTHEAST ASIAN REGION

Izdiharsyah Akbar¹, Firman Hasan¹, Sri Oktavia¹
Law Departement¹Faculty of Law, Andalas University¹
(E-mail : Harsyah_A@hotmail.com)

ABSTRACT

ASEAN Political – Security Community (APSC) is an agreement that was agreed upon by the ASEAN states to insure peace in the Southeast Asia Region, pushing cooperation in the fields of politics and security between ASEAN states. But this agreement caused confusion in regulations and its implementation. It was cause by the ASEAN states, having different views and missions, rules of law in handling issues regarding politics and security, eventually making implementations ambiguous and problem solving through ASEAN Political Security – Community very difficult to do. With this background, several problems that arise are as follows: 1). What is the framework of ASEAN Political – Security Community? 2). How are the implementations of the clauses in ASEAN Political – Security Community 3). What are the solutions that can be implemented in solving the challenges in the execution of the ASEAN Political – Security Community. This study uses a Juridical Sociological – Empirical approach that focuses on the current laws and the facts found in society combined with the use of primary and secondary sources and qualitative analysis. This study showed that the framework of ASEAN Political - Security Community is divided into different sartorial bodies which oversees different issues, *ASEAN Security Community Coordinating Conference* (ASCO). ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Commission for the Southeast Asia Nuclear – weapons – free zone (SEANFWZ Commission), ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM), ASEAN Law Minister Meeting (ALAWMM), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Regional Forum (ARF). Each agreements from these sub-bodies will be use to formulate laws in each ASEAN Nation. Challenges that happen are the different commitments from the ASEAN states to the APSC and the solution is each ASEAN states have to increase cooperation in the fields of politics and security.

Keyword: Analysis, Agremeent, ASEAN Political – Security Community, Southeast Asia